



SELUMA

SELASA, 29 JUNI 2021

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

844 Unit Randis Nunggak Pajak

SELUMA - Sebanyak 844 unit kendaraan dinas (randis) milik Pemkab Seluma tercatat hingga saat ini belum melakukan pembayaran pajak kendaraan. Total tunggakan pajak randis di Pemkab Seluma mencapai Rp 1,2 miliar. Hal ini tak sejalan dengan apa yang menjadi imbaun pemerintah agar masyarakat taat dalam membayar pajak.

"Di Kabupaten Seluma sendiri tunggakan pajak randis cukup tinggi karena kesadaran pengguna randis masih rendah terhadap kewajiban membayar pajak," kata Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Seluma, Drs. Pitaimiko.

Ia menjelaskan, rincian tunggakan pajak randis tersebut terdiri dari roda dua 675 unit dengan total tunggakan pajak belum terbayar Rp 352 juta, dan roda empat 169 unit dengan total tunggakan pajak Rp 946 juta.

Menurutnya, kendaraan tersebut seluruhnya sudah ada dilelang tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga hal tersebut menyebabkan pembengkakan tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemkab Seluma. "Jika tidak dilakukan pembayaran maka jumlah tunggakan akan terus bertambah setiap bulannya karena setiap bulan ada yang jatuh tempo, tapi tidak dibayar juga. Sementara untuk kendaraan yang sudah lelang ikut disampaikan ke Samsat" terangnya.

Ditambahkannya, sudah beberapa tahun terakhir ada program pemerintah provinsi untuk keringanan pembayaran pajak bagi kendaraan yang menunggak pajak. Termasuk pemutihan atau balik nama kendaraan. Bahkan, UPTD PPD juga sudah melakukan koordinasi dan menyurati satu per satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut juga tidak membuahkan hasil maksimal hingga kesadaran pembayaran pajak mobil dinas bisa meningkat. "Kita berharap pendapatan PAD dari pajak kendaraan bertambah.

Dan warga serta Pemkab dapat membayar pajak kendaraan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Seluma Marah Halim, SP, MP, M.Si, M.Ak mengatakan, seluruh kendaraan dinas tersebut merupakan tanggung jawab masing-masing OPD selaku pengguna kendaraan. Anggaran sudah dialokasikan untuk kebutuhan rutin pembayaran pajak "Itu tanggung jawab masing-masing OPD, karena anggaran sudah dialokasikan untuk itu," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini masih banyak kendaraan dinas yang rusak dan tidak bisa di pergunakan lagi, seperti pada Dinas Kesehatan, kendaraan kepala desa dan lainnya. Maka dari itu pihaknya akan melakukan pendataan ulang agar kedepannya tidak ada dalam tunggakan pajak setiap tahunnya. "Yang rusak akan kita data dan akan disampaikan ke Samsat. Termasuk kendaraan yang sudah dilelang sebelumnya," jelasnya. (juu)